



APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara
dan Hukum Administrasi Negara

Rilis Media

Konferensi Nasional APHTN-HAN 2023: Dinamika Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Negara sebagai Implementasi UUD 1945 Batam, 29 September - 2 Oktober 2023

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) akan menyelenggarakan Konferensi Nasional pada 29 September - 2 Oktober 2023 di Batam, Kepulauan Riau. Pada tahun ini, Konferensi Nasional APHTN-HAN (KNAPHTN-HAN) akan fokus pada tema **Dinamika Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Negara sebagai Implementasi UUD 1945**. KNAPHTN-HAN merupakan forum akademik tahunan bagi anggota APHTN-HAN yang saat ini terdaftar sebanyak 1308 (seribu tiga ratus delapan) anggota yang merupakan Dosen hukum tata negara dan hukum administrasi negara perguruan tinggi negeri/swasta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia maupun bagi para peneliti serta praktisi HTN-HAN.

Tema Dinamika Pemilu dan Penyelenggaraan Negara merupakan tema yang merefleksikan momentum tahun 2023 sebagai tahun yang penuh dengan agenda ketatanegaraan menuju Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2024. Tidak hanya berkaitan dengan Pemilu 2024, dinamika penyelenggaraan negara juga menjadi tema inti pada konferensi tahun ini, sebab berkaitan dengan perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah berlangsung selama 9 tahun dan agenda pembentukan pemerintahan pasca Pemilu 2024.

Oleh karena itu, panel diskusi pada KNAPHTN-HAN terbagi atas 5 (lima) panel utama, yaitu (1) panel diskusi Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu, (2) panel diskusi Reformasi Regulasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, (3) panel diskusi Sistem Presidensiil dan Pembentukan Kabinet Kedepan, (4) panel diskusi Hukum Administrasi Negara Sektoral (Perizinan) dan (5) panel diskusi kewenangan PTUN dalam mewujudkan keadilan hukum. Kelima panel tersebut akan melahirkan rekomendasi agenda penataan hukum khususnya HTN dan HAN kedepan.

Isu-isu yang akan didiskusikan dalam konferensi nasional merupakan respon para akademisi HTN-HAN terhadap dinamika Pemilu 2024 dan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Setidaknya hingga saat ini, Tim Perumus telah menerima 200-an paper dari pengajar dan pemikir HTN-HAN se Indonesia yang berisi mengenai isu-isu HTN dan HAN yang perlu dibahas dan direspon dalam KNAPHTN-HAN.

Terdapat beberapa isu krusial yang diusulkan untuk dibahas lebih lanjut dalam konferensi, misalnya berkaitan dengan jaminan kepastian, independensi dan efektivitas penyelesaian pelanggaran Pemilu serta sengketa Proses Pemilu 2024 baik oleh Bawaslu, PTUN maupun sengketa hasil oleh MK mengingat ketatnya kompetisi antar peserta Pemilu. Kemudian relasi *stakeholder* penyelenggara Pemilu antara KPU-Bawaslu dan DKPP. Terdapat pemikiran mengenai penataan pengawasan terhadap KPU, khususnya batasan-batasan kewenangan DKPP yang jangan sampai terlalu jauh

KANTOR PENGURUS PUSAT

Plaza BP Jamsostek, Jl. H.R. Rasuna Said, Kavling 112 B, Lantai 8, Kuningan,
Jakarta Selatan -12940 | 0812 7919 2666 | email : aphtnhanmail@gmail.com | aphtnhan.id



APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara
dan Hukum Administrasi Negara

masuk pada wilayah kebijakan (diskresi) penyelenggaraan Pemilu 2024. Selain itu, pelaksanaan kewenangan Bawaslu yang perlu diperkuat dalam rangka penegakan hukum Pemilu.

Selanjutnya isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang tergambar dari paper yang diajukan, misalnya gagasan deregulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (pusat dan daerah) termasuk prosedur dan efektivitas penggunaan *omnibus law* di tengah masih banyaknya catatan kritis atas metode ini. Kemudian, perlu didiskusikan model pembentukan kabinet pemerintahan hasil Pemilu 2024 agar terhindar dari sekedar bagi-bagi kursi. APHTN-HAN pada konferensi 2019 juga pernah merekomendasikan agar Kementerian Koordinator dihapuskan mengingat efektifitasnya. Selain itu, batasan jumlah Kementerian yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara perlu didiskusikan. Saat ini jumlah Kementerian dibatasi paling banyak 34 Kementerian. Pengaturan ini perlu didiskusikan ditinjau dari perspektif konstitusi, hak prerogatif Presiden dan kebutuhan pemerintahan. Perlu pemetaan lembaga-lembaga ad hoc yang dibentuk oleh Pemerintah, yang seharusnya dikembalikan fungsinya ke Kementerian terkait.

Selain itu, isu reformasi sistem administrasi pemerintahan juga mendapat perhatian. Gagasan yang berkembang misalnya mengenai digitalisasi administrasi pemerintahan, penyederhanaan perizinan untuk aktivitas perekonomian dan akuntabilitas perbuatan hukum pemerintahan.

Semua isu krusial tersebut telah dirangkum oleh Tim Perumus dan akan didiskusikan lebih lanjut dalam forum konferensi untuk merumuskan rekomendasi-rekomendasi hasil KNAPHTN-HAN 2023. Hasil konferensi tersebut akan disampaikan kepada Presiden dan pihak terkait lainnya, misalnya KPU dan Bawaslu serta kepada Para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pilpres 2024. Tentu APHTN-HAN berkepentingan untuk melihat sejauh mana sikap dan gagasan Para Capres atas hasil rekomendasi yang dihasilkan dalam KNAPHTN-HAN ini.

Untuk memantik diskusi dalam KNAPHTN-HAN juga akan diundang Para narasumber kredibel dalam konferensi ini antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Mahkamah Konstitusi: Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih dan Guntur Hamzah yang juga merupakan Ketua Umum APHTN-HAN. Kemudian Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan pakar studi keadilan Pemilu internasional dari Universitas degli Studi Italy, Alberto Guevara Castro.

Jakarta, 27 September 2023

Prof.Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.,M.H.
(Sekretaris Jenderal APHTN-HAN)

KANTOR PENGURUS PUSAT

Plaza BP Jamsostek, Jl. H.R. Rasuna Said, Kavling 112 B, Lantai 8, Kuningan,
Jakarta Selatan -12940 | 0812 7919 2666 | email : aphtnhanmail@gmail.com | aphtnhan.id